

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya menciptakan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas, efektif, dan efisien, Indonesia terus melakukan reformasi sistem anggaran dari tahun ke tahun. Reformasi anggaran sudah mulai dilakukan sejak tahun 2003 ditandai dengan terbitnya tiga undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun dokumen rencana keuangan tahunan atau disebut dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Negara/Lembaga. RKA merupakan salah satu sumber informasi utama dalam penyusunan anggaran negara. Dalam penyusunan RKA Menteri/Pimpinan Lembaga dapat berpedoman pada tiga pendekatan sistem penganggaran yaitu penganggaran terpadu, Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), serta Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).

Menurut PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perencanaan dan penganggaran yang ada saat ini dilakukan berdasarkan *money follow program* melalui Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). PBK merupakan sistem penganggaran yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran yang mana memperhatikan hubungan antara pendanaan, kinerja, dan pencapaian kinerja tersebut (Biswana, Rossarib, & Alhadic, 2018). PBK telah diterapkan di Indonesia dari tahun 2004 dan terus mengalami penyempurnaan untuk mencapai sistem penganggaran yang berkualitas. Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam rangka penyempurnaan sistem penganggaran. Lalu, selanjutnya dilakukan pemfokusan informasi kinerja agar semakin jelas, relevan, dan terukur (Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 2016). Sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 serta PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dokumen RKA Kementerian Negara/Lembaga yang disusun dengan pendekatan PBK berisikan mengenai informasi kinerja dan rincian anggaran.

Informasi Kinerja dalam RKA Kementerian Negara/Lembaga memuat program, kegiatan, serta sasaran kinerja. Sesuai dengan PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, Pemerintah dalam penyusunan ADIK yang ada dalam RKA Kementerian Negara/Lembaga digunakan metode

logic model, yaitu kerangka berpikir yang menunjukkan keterkaitan yang logis antara hasil/*outcome*, keluaran/*output*, aktivitas/kegiatan, dan *input* sesuai dengan indikator dan target kinerja yang telah ditentukan suatu organisasi. Penggunaan *logic model* dalam penyusunan ADIK diharapkan dapat memperlihatkan keterkaitan yang jelas antara *input*, *output* serta *outcome* dari suatu program. *Input* yang berupa sumber daya untuk menghasilkan *output* harus selaras dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung tercapainya *output* dan *outcome*. Rumusan *outcome* yang dibuat juga harus realistis, penting, serta terukur sesuai dengan kebutuhan pihak eksternal/*customer*. Jadi, penerapan *logic model* yang kuat dan tajam dalam perencanaan penganggaran memiliki peranan yang penting terutama dalam penyusunan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) yang dicantumkan pada RKA Kementerian Negara/Lembaga.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan peninjauan mengenai penerapan *logic model* dalam penyusunan Arsitektur dan Informasi Kinerja. Peninjauan tersebut meliputi penyusunan informasi kinerja dengan *logic model* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020-2021 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung serta kendala yang dihadapi satuan kerja dalam penerapan *logic model* pada penyusunan arsitektur dan informasi kinerja. Hasil tinjauan tersebut akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir (KTTA) dengan judul Tinjauan Atas Implementasi *Logic*

Model dalam Penyusunan Arsitektur dan Informasi Kinerja Pada KPPN Bandar Lampung Tahun 2020-2021.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari karya tulis tugas akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan *logic model* dalam penyusunan arsitektur dan informasi kinerja pada KPPN Bandar Lampung tahun 2020-2021?
2. Apa saja permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyusunan arsitektur dan informasi kinerja pada KPPN Bandar Lampung tahun 2020-2021?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui penerapan *logic model* dalam penyusunan arsitektur dan informasi kinerja pada KPPN Bandar Lampung tahun 2020-2021.
2. Mengetahui permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyusunan arsitektur dan informasi kinerja pada KPPN Bandar Lampung tahun 2020-2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan KTTA ini yaitu mencakup penerapan *logic model* dalam penyusunan arsitektur dan informasi kinerja dalam dokumen perencanaan penganggaran yaitu Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dengan adanya penulisan karya tulis tugas akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan oleh penulis selama menempuh mata kuliah Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

2. Bagi Akademik dan Pembaca

Sebagai sarana untuk menambah referensi terkait penulisan karya tulis dalam KTTA mengenai penerapan *logic model* dalam penyusunan arsitektur dan informasi kinerja pada suatu satuan kerja serta sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca terkait dengan penerapan *logic model* dalam proses perencanaan penganggaran negara.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan karya tulis tugas akhir (KTTA) ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 2003). Metode ini dilakukan dengan cara menghimpun data dan informasi yang telah diterbitkan baik dari buku maupun internet.

Studi kepustakaan yang digunakan dalam KTTA ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan informasi kinerja.

Referensi lain seperti jurnal publikasi serta laporan dapat digunakan sebagai data pendukung dalam penulisan. Selain itu, dokumen perencanaan penganggaran yaitu Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) juga digunakan untuk sebagai sumber analisis dalam penulisan KTTA.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan cara mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan sesuai dengan objek KTTA. Metode yang akan dilakukan adalah melalui wawancara.

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tatap muka untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan penelitian (Narbuko & Achmadi, 2007). Dalam penulisan KTTA ini wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait pembahasan penulisan secara runtut, tersusun, dan sesuai dengan pedoman wawancara untuk mendapatkan data tambahan yang dapat mendukung analisis pembahasan. Wawancara dilakukan kepada pegawai yang terkait langsung dengan proses perencanaan penganggaran.

1.7 Sistematika Penulisan KTTA

Karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab dan setiap bab terdiri atas subbab-subbab dengan sistematika penyajian sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu berisikan gambaran umum yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat dan sistematika penulisan serta sistem penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini disajikan teori-teori yang berkaitan dengan PBK serta logic model yang terdiri atas uraian konsep dasar PBK, konsep *logic model* dalam penataan informasi kinerja, serta penjelasan langkah-langkah dalam penyusunan informasi kinerja.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diungkapkan metode pengumpulan data yang tercantum dalam karya tulis, serta gambaran umum objek penulisan berupa profil kantor, tugas pokok dan fungsi, dan struktur organisasi. Pada bagian pembahasan diuraikan penjelasan mengenai hasil tinjauan informasi kinerja pada dokumen perencanaan dan penganggaran KPPN Bandar Lampung tahun anggaran 2020-2021 yang disinkronisasikan dengan informasi kinerja DJPb.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab empat berisi simpulan umum dari penjelasan yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN